

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2024

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN
PROVINSI BANTEN



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Banten

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bentuk format pertanggung-jawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKjIP ini bermanfaat untuk

1. Mendorong Instansi Pemerintah melaksanakan Good Governance, karena LkjiP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggung-jawabkan:
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dengan Instansi Pemerintah
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan LKjIP sebagai pertanggung-jawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten sebagai salah satu OPD yang mengemban tugas dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan Implikasi ditetapkannya visi Pemerintah Provinsi Banten.

Dalam periode RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, tahun 2023-2026 merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Tahun 2023-2025, yang merupakan tahap modernisasi. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode tersebut ditujukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan dalam RPJPD. Visi pembangunan Provinsi Banten,

sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, adalah **“Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”**. ‘

Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari; dan
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bappeda Provinsi Banten tersebut, maka dirumuskan tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Bappeda selama kurun waktu lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan yang jelas dan terukur;
2. Perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergi;
3. Konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
4. Dukungan sumber daya pemerintahan yang kompeten dan modern dalam perencanaan pembangunan

Adapun sasaran sebagai bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama dalam penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya organisasi. Dalam melaksanakan kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis data, hasil kajian/penelitian dan evaluasi;
2. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah;
3. Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang;
4. Terwujudnya kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar Provinsi dan luar negeri;
5. Terwujudnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat;
6. Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang;
7. Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan;
8. Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran;
9. Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan;
10. Meningkatnya indeks keterbukaan informasi public;
11. Meningkatnya Kompetensi Pegawai Bappeda Provinsi Banten.

KATA PENGANTAR

Assamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP merupakan dasar setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), hal ini bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Penyusunan dan pelaporan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian LKjIP Tahun 2024 pada dasarnya menginformasikan gambaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten secara utuh selama perjalanan Tahun 2024, berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan dengan pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja *input*, *output* dan *outcome* dari setiap program dan kegiatan.

Akhir kata, melalui penyampaian LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten Tahun 2024 dapat memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program dan kegiatan tahun yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, 7 Januari 2025
KEPALA BAPPEDA PROVINSI
BANTEN,

Dr. MAHDANI, SE, ST, M.Si, MM
NIP. 19690219 200112 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Ikhtisar Eksekutif.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Dasar Hukum	3
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
1.5. Isu - Isu Strategis	14
1.6. Proses Bisnis.....	15
1.7. Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2024.....	16
1.8. Sistematika Laporan	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
2.1. Perubahan Rencana Strategis 2023 - 2026	20
2.2. Perubahan Rencana Kerja 2024	26
2.3. Perubahan Perjanjian Kinerja 2024.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3 1. Capaian Kinerja Tahun 2024	
3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024	32
3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .	34
3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisas	35
3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun dengan Provinsi lain	36

3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan..	36
3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	38
3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)	45
3.2. Realisasi Anggaran	54
BAB IV PENUTUP	84
4.1 Kesimpulan	84
4.2 Saran - Saran Rekomendasi	85
LAMPIRAN	
- Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan Tahun 2024	
- Surat Pernyataan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)	
- Penghargaan Badan Peencanaan Pembangunan Daerah tahun 2024	

-

DAFTAR TABEL

Tabel 2. Sasaran Strategis dan Target BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 202..	21
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026	24
Tabel 2.2 Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja (PK) dan Target Tahun 2024	28
Tabel 2.3 Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DPPA- TA 2024	29
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024	33
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja	34
Tabel 3.3 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	35
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Provinsi Lain Tahun 2024...	36
Tabel 3.5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	37
Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	38
Tabel 3.7 Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) tahun 2024	39
Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	45
Tabel 3.9 Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	54
Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja Anggaran Tujuan dan Sasaran ...	63

DAFTAR GAMBAR



Gambar.1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten Tahun 2024.....	6
Gambar 2. Proses Bisnis dan Cascading Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKjIP mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026, Rencana Kinerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2024.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) utama yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan di tingkat Provinsi, memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam merancang strategi pembangunan di masa depan dalam rangka menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Banten.

Dalam rangka untuk menjamin kegiatan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran, BAPPEDA Provinsi Banten, sebagai entitas utama pelaksanaan perencanaan di Provinsi Banten harus mampu menghadirkan proses perencanaan yang inklusif, transparan dan akuntabel.

Sehubungan hal tersebut, Bappeda Provinsi Banten berupaya untuk memenuhi tuntutan publik dan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai transparansi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan serta pengelolaan anggaran keuangan negara. Hal mendasar yang ingin dicapai pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permen-PAN & RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Daerah, maka dokumen LKjIP ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggaraan negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dimandatkan kepada organisasi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Didalam LKjIP ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Maksud dari penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja ini adalah agar pencapaian kinerja dari Bappeda Provinsi Banten dapat tercapai sesuai dengan target dan sasaran rencana strategis. LKjIP ini merupakan sistem pengendalian manajemen disektor publik yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Banten sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Tujuan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi kinerja dari instansi pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dengan sasaran meliputi sebagai berikut :

1. Tersusunnya Data Dan Informasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Program Pembangunan Instansi Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Bappeda Provinsi Banten yang sesuai dengan Tugas, Pokok Dan Fungsi Serta kewenangannya untuk Tahun Anggaran 2024.
2. Teridentifikasi Data Capaian Kinerja Dari Indikator Kinerja Kegiatan Program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan yang tertuang dalam Dokumen Anggaran Organisasi Perangkat Daerah sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Program yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Banten.
3. Teridentifikasi data dan informasi bahan Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran berikutnya, yaitu Tahun Anggaran 2025.
4. Terinformasikan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Bappeda Provinsi Banten yang terurai dalam indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

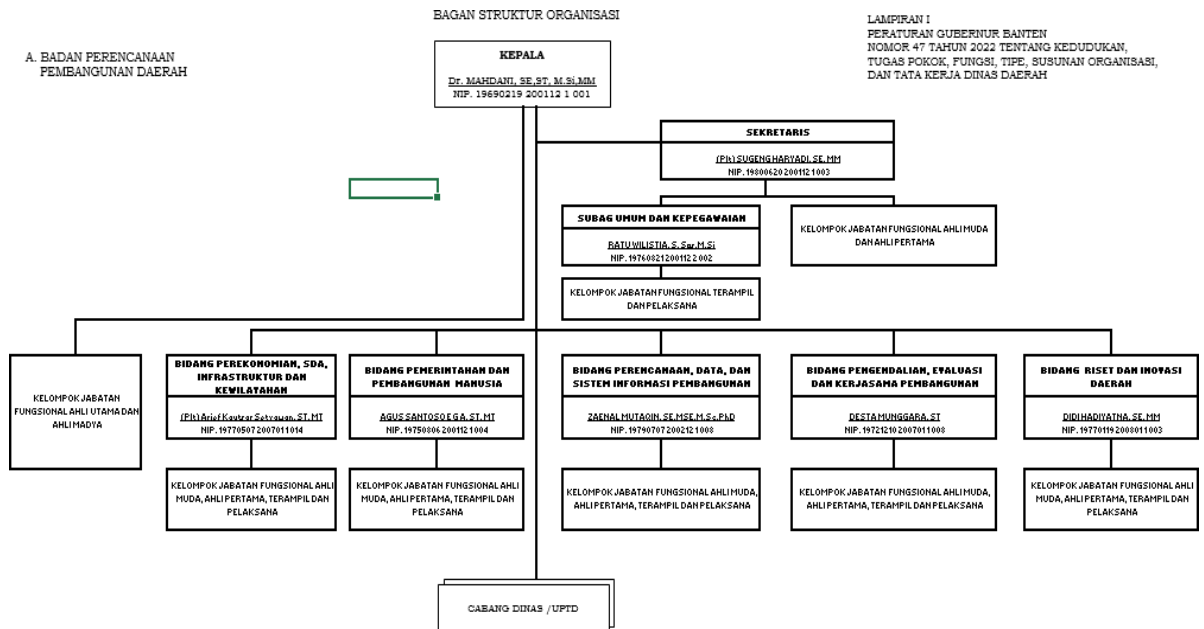


3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Kementerian PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis *Penyusunan Perjanjian Kinerja*, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas ***Laporan Kinerja Instansi Pemerintah***;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

9. Peraturan Gubernur PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 47 TAHUN 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten sebagai berikut :



Gambar.1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten Tahun 2024

Tugas Pokok dan Fungsi

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan penunjang Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;

- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan rencana strategis dan rencana kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. menetapkan rencana kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- d. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku;
- e. merumuskan penyelenggaraan:
 - a. Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - c. Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- f. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah;
- g. menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- 1) menyusun rencana kerja di lingkungan Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis Badan;
 - 2) mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;
 - 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
 - 5) merencanakan rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan program/kegiatan, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan;
 - 6) menyelenggarakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 7) menyelenggarakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 8) menyelenggarakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - 9) menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 10) menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 11) menyelenggarakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 12) menyelenggarakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 13) menyelenggarakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 14) menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan di lingkungan Badan;
 - 15) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif kegiatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Badan ;
 - 16) menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
 - 17) menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
 - 18) melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, penyelenggaraan kearsipan, pengelolaan barang dan aset, kerumahtanggaan, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) merencanakan sub kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) membagi tugas kepada bawahan;
 - 4) membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 5) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 6) melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah;
 - 7) melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 8) melaksanakan Administrasi Umum, Tata usaha dan Kehumasan Perangkat Daerah;
 - 9) melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada Perangkat Daerah;
 - 10) melaksanakan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah;
 - 11) melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - 12) melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang;
 - 13) melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - 14) menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 15) melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan kerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - 16) melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3 Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
 - a. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
 - b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Badan;
 - 2) mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Bidang;
 - 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang;
 - 5) menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam); dan
 - b. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 - 6) menyelenggarakan sekretariat rencana aksi daerah pangan dan gizi dan rencana aksi daerah gas rumah kaca Provinsi Banten;
 - 7) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan badan;
 - 8) menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan dilingkungan Bidang; dan
 - 9) melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4 Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Badan;
- 2) mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Bidang;
- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang;
- 5) menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 6) menyelenggarakan Koordinasi dan Konvergensi Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim di Provinsi Banten;
- 7) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan badan;
- 8) menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan di lingkungan bidang; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5 Kepala Bidang Perencanaan, Data, dan Sistem Informasi Pembangunan

a. Kepala Bidang Perencanaan, Data dan Sistem Informasi Pembangunan mempunyai tugas pokok memantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Bidang Perencanaan, Data dan Sistem Informasi Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut

- 1) menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Badan;
- 2) mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Bidang;

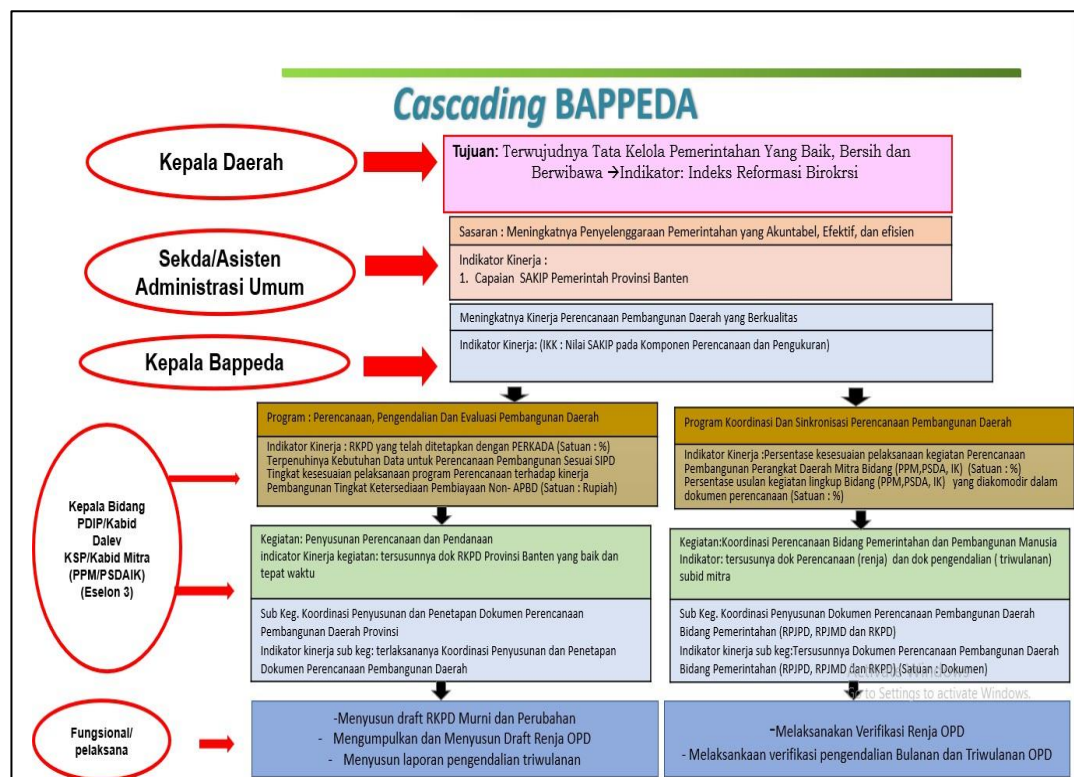
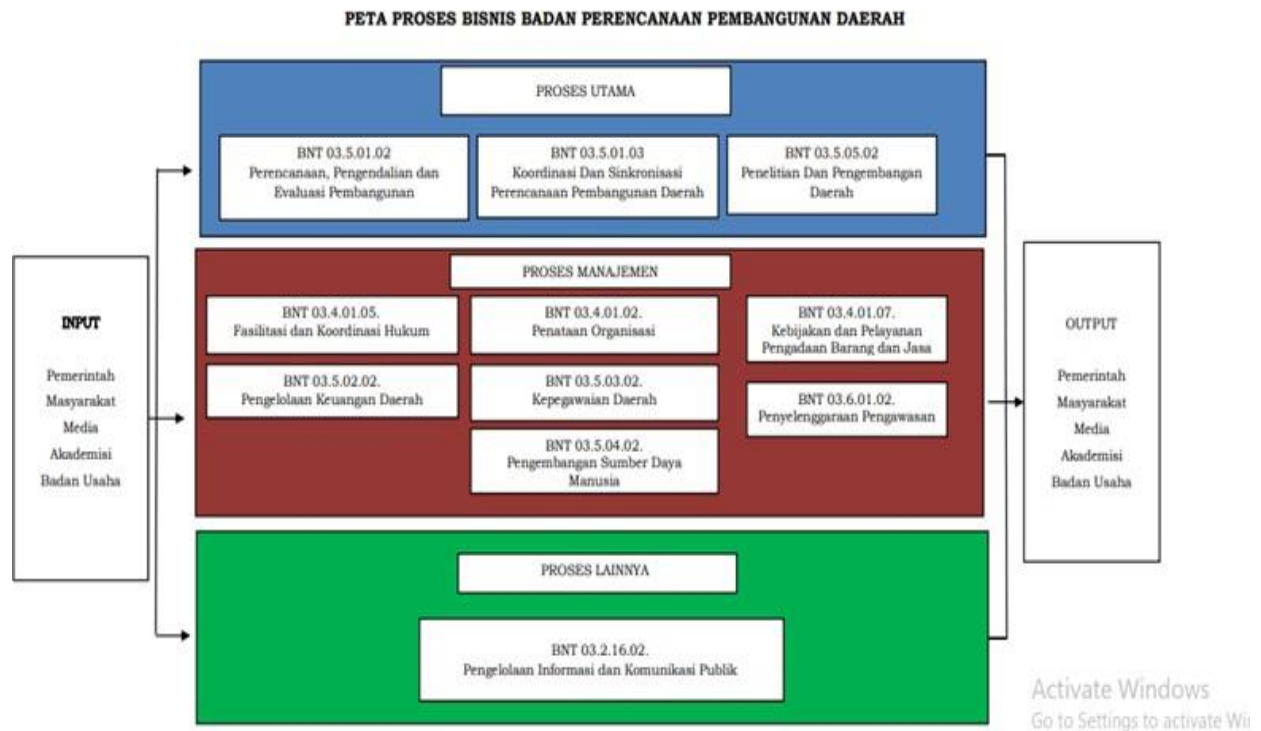
- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang;
 - 5) menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - c. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.
 - 6) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan badan;
 - 7) menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan di lingkungan bidang; dan
 - 8) melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6 Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan
- a. Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
 - b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Badan;
 - 2) mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Bidang;
 - 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang;
 - 5) menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a. Laporan kinerja Pembangunan Daerah;
 - b. Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;

- c. Pengendalian kerjasama daerah; dan
 - d. Pengendalian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.
 - 6) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan badan;
 - 7) menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan dilingkungan bidang; dan
 - 8) melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7 Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah
- a. Kepala Bidang Riset dan Inovasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
 - b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Badan;
 - 2) mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Bidang;
 - 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang;
 - 5) menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi :
 - a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
 - c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
 - 6) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan badan;
 - 7) menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan dilingkungan bidang; dan
 - 8) melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5. Isu isu strategis

ISU STRATEGIS				
1. Masih Perlunya Penguatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan				
2. Masih Kurangnya Kebijakan Perencanaan Pembangunan yang didasari Hasil Penelitian				
Visi : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQL KARIMAH				
Misi : MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN BERWIBAWA				
No	Tujuan	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya kualitas perencanaan pembangunan yang berkelanjutan	Nilai Komponen Perencanaan dan pengukuran pada penilaian SAKIP Provinsi	Meningkatkan kualitas Dokumen Perencanaan dan pengukuran kinerja daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan; Optimalisasi Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatkan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan
			Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;	Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
2	Terwujudnya pemanfaatan hasil penelitian pengembangan dan penerapan inovasi daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian pengembangan dan penerapan inovasi daerah	Meningkatkan peran aktif perangkat daerah, kabupaten dan kota dalam inovasi daerah.	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
				Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
				Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
				Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi

1.6 Proses Bisnis



Gambar 2. Proses Bisnis dan Cascading Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten

1.7 Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2024

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** Provinsi Banten Tahun 2023 sebesar **70,15** dengan **Kategori BB (Sangat Baik)** yang diperoleh dari hasil penilaian pemenuhan kriteria terhadap 4 (empat) komponen dan 12 (dua belas) sub komponen adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	NILAI
1	2	3	4
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,8
2 .	Pengukuran Kinerja	30	21,6
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,75
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	10
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA		100,00	70,15

Hasil penilaian pemenuhan kriteria pada komponen dan sub komponen yang telah dilaksanakan :

1. PERENCANAAN KINERJA

- a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia
Kondisi dari sub komponen ini adalah dokumen perencanaan kinerja telah terpenuhi.
- b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)
Kondisi dalam sub komponen ini telah memenuhi standar sesuai dengan mandat ketentuan, namun masih terdapat catatan yaitu dokumen Renja tidak memuat indikator kinerja sasaran, dan hanya menyajikan indikator kinerja program
- c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
Kondisi dalam sub komponen ini telah memenuhi standar sesuai dengan mandat ketentuan, namun dokumen Renja belum memuat rencana aksi yang menggambarkan tahapan tindaklanjut yang akan dilaksanakan dari permasalahan yang dihadapi;

2. PENGUKURAN KINERJA

- a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan
Kondisi dari sub komponen ini adalah pengukuran kinerja telah dilaksanakan, namun standar prosedur pengukuran data kinerja dan Standar Prosedur pengumpulan data belum disusun

- b. Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

Kriteria pada sub komponen ini telah terpenuhi, namun belum ada upaya yang inovatif untuk menjadi percontohan bagi perangkat daerah lain.

- c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

Kondisi dari sub komponen ini adalah pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, namun masih terdapat kelemahan yaitu:

- 1) Pengukuran kinerja belum dijadikan dasar pengangkatan/pemberhentian jabatan struktural/fungsional;
- 2) Dokumen Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) OrganisasiTerdapat beberapa kriteria yang tidak terpenuhi pada sub komponen ini yaitu :

3. PELAPORAN KINERJA

- a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja

Kondisi dari sub komponen ini adalah beberapa kriteria dalam pemenuhan dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar sesuai dengan mandat ketentuan, namun belum ada upaya inovatif serta dapat dijadikan percontohan bagi OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

- b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya

Kondisi dari sub komponen ini telah memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, namun laporan kinerja belum menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

- c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

LKjIP telah menginformasikan upaya organisasi dalam melaksanakan hasil evaluasi capaian kinerja melalui rencana aksi, namun :

- 1). LKjIP belum digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja pada tahun berikutnya
- 2). LKjIP belum berpengaruh signifikan terhadap budaya kinerja organisasi

4. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

Kriteria evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah memenuhi standar sesuai dengan mandat ketentuan, namun pelaksanaan evaluasi AKIP baru pada tahap pemenuhan dokumen belum pada kebutuhan akan pentingnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai
Kondisi dari sub komponen ini adalah pemenuhan atas kriteria kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah memadai, namun Badan Perencanaan Provinsi Banten belum menetapkan Tim Evaluasi AKIP Internal
- c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

1.8 Sistematika Laporan

Pada dasarnya laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Banten selama tahun 2024. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Banten Tahun 2024 berpedoman pada Permen-PAN&RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Maksud & Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.5 Isu - Isu Strategis
- 1.6 Proses Bisnis
- 1.7 Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2024
- 1.8 Sistematika Laporan

Bab II Perencanaan Kinerja

- 2.1 Perubahan Rencana Strategis 2023 - 2026
- 2.2 Perubahan Rencana Kerja 2024
- 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja 2024

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024
 - 3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - 3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

- 3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
- 3.2 Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran - Saran Rekomendasi

Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Surat Pernyataan telah di reviu
- 3) BA LHE
- 4) Lain- lain yang dianggap perlu



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perubahan Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam periode RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, tahun 2023-2026 merupakan tahun pertama dari RPJMD ke-5, Tahun 2023-2025, yang merupakan tahap modernisasi. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi periode tersebut ditujukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan dalam RPJPD. Visi pembangunan Provinsi Banten, sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, adalah **“Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu :

- Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
- Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
- Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari; dan
- Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa

Strategi dan Arah kebijakan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 mempedomani pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026.

Strategi pada hakekatnya menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, rasional, realistik dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun strategi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan serta meningkatkan hasil penelitian pengembangan dan penerapan inovasi daerah, adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas Dokumen Perencanaan dan pengukuran kinerja daerah ;
- Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Meningkatkan peran aktif perangkat daerah, kabupaten dan kota dalam inovasi daerah.

Tabel 2. Sasaran Strategis dan Target BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				MURNI	PERUBAHAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80	70-80
2	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Nilai komponen Perencanaan dan Pengukuran pada Penilaian SAKIP Provinsi	Kategori/ Nilai	45	47
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Penerapan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Level	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

*Dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 dilampirkan dalam dokumen LKjIP ini

2.1.2 Arah Kebijakan Bappeda Provinsi Banten

Kebijakan umum Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain:

- a) Optimalisasi Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b) Meningkatkan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- c) Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- d) Meningkatkan Kualitas Verifikasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- e) Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f) Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);
- g) Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- h) Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- i) Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
- j) Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- k) Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi.

Untuk Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah.



Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026

	Visi : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQL KARIMAH						
	Misi : MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN BERWIBAWA						
No	Tujuan	Sasaran PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
1	Terwujudnya kualitas perencanaan pembangunan yang berkelanjutan	Nilai Komponen Perencanaan dan pengukuran pada penilaian SAKIP Provinsi	Nilai komponen Perencanaan dan Pengukuran pada Penilaian SAKIP Provinsi	1.1	Meningkatkan kualitas Dokumen Perencanaan dan pengukuran kinerja daerah	1.1.1	Peningkatan Kualitas Pendanaan Pembangunan
						1.1.2	Optimalisasi Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
						1.1.3	Meningkatkan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

						1.1.4	Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan pengendalian Pembangunan
				1.2	Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;	1.2.1	Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						1.2.2	Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
						1.2.3	Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

2	Terwujudnya pemanfaatan hasil penelitian pengembangan dan penerapan inovasi daerah	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian pengembangan dan penerapan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	2.1	Meningkatkan peran aktif perangkat daerah, kabupaten dan kota dalam inovasi daerah.	2.1.1	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
						2.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
						2.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
						2.1.4	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi

2.2 Perubahan Rencana Kerja 2024

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Bappeda dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Perihal Rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten yang akan dilaksanakan selama 4 (empat) tahun kedepan, selaras dengan Rencana Pembangunan daerah (RPD) 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan:

- 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 1.2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 1.4 Pengadaan Barang Milik Negara Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.7 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; dan
- 1.8 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan:

- 2.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 2.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam); dan
- 2.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

3. Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan kegiatan:

- 3.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
- 3.2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 3.3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 3.4 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah, dengan kegiatan:

- 4.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- 4.2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
- 4.3 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- 4.4 Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program, demikian juga untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan.

2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur Provinsi Banten) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.

Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja utama Tahun 2024, dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja (PK) dan Target Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				MURNI	PERUBAHAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80	70-80
2	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Nilai komponen Perencanaan dan Pengukuran pada Penilaian SAKIP Provinsi	Kategori/ Nilai	45	47
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Penerapan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Level	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

Berdasarkan indikator kinerja Perangkat Daerah yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Provinsi Banten, maka disusun 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU) Kepala BAPPEDA yang ditetapkan bernilai strategis dan memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan performa kinerja BAPPEDA Provinsi Banten. Program-program yang dikerjakan oleh BAPPEDA Provinsi Banten pada tahun 2024, yang diharapkan dapat meningkatkan performa dan kinerja sesuai dengan tupoksinya adalah:

Tabel 2.3
Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DPPA- TA 2024

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
5.01	PERENCANAAN	56.650.193.305	52.924.978.924	(3.725.214.381)
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	45.133.208.425	42.811.374.644	(2.321.833.781)
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	7.116.984.880	6.555.520.280	(561.464.600)
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.400.000.000	3.558.084.000	(841.916.000)
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.202.355.966	2.309.723.966	107.368.000
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.202.355.966	2.309.723.966	107.368.000
	JUMLAH	58.852.549.271	55.234.702.890	(3.617.846.381)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA PROVINSI BANTEN 2024

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun tahapan setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Di samping itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja dari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan kebijakan-program-kegiatan pada instansi/unit kerja pelaksanaannya. Dengan indikator kinerja, organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau gagal di masa yang akan datang. Secara umum, indikator kinerja memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Memperjelas tentang apa, berapa, dan bilamana suatu kegiatan dilaksanakan. Kegiatan pada umumnya berjangka waktu tidak lebih lama dari satu tahun. Kejelasan apa yang akan dilakukan dalam aktivitas keseharian organisasi dalam pencapaian visi dan misi organisasi akan terwakili melalui pendefinisian indikator kinerja mengingat kinerja adalah ukuran tentang tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh suatu organisasi sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

- b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan dalam menilai kinerjanya termasuk kinerja instansi pemerintah yang melaksanakannya. Karena indikator kinerja memberikan rambu-rambu bagi organisasi untuk melaksanakan kegiatannya, maka setiap pihak perlu mendapatkan kesepahaman tentang tahapan dan kriteria yang dibangun dalam menjalankan aktivitasnya
- c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja. Indikator akan menjadi patokan bagi organisasi dalam menjalankan tugasnya.

3.1. Capaian Kinerja BAPPEDA

Sebelum menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pengukuran kinerja sebagai akibat dilakukannya aktivitas, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai perencanaan kinerja. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ PRTC} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ PRTC} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Keterangan : PRTC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

Skala Penilaian:

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir Perjanjian Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri oleh Bappeda Provinsi Banten terhadap hasil pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (SIMAKIP) dan lain-lain.

Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal - hal yang mendukung keberhasilan sekaligus hal - hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan pencapaian target. Diupayakan pula menginventarisir langkah - langkah antisipasi yang akan dilakukan sehingga kinerja pemerintah semakin baik pada masa - masa yang akan datang.

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2024 (PK Perubahan)	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70	70,15	85,18
2	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Nilai komponen Perencanaan dan Pengukuran pada Penilaian SAKIP Provinsi	47	43,35	78,40
3	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian pengembangan dan penerapan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	60 Sangat inovatif	45,57 Inovatif	76,50

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku perangkat Daerah yang mengampu bidang Perencanaan mempunyai tanggung jawab dalam pemenuhan dokumen perencanaan daerah. Terkait dengan hal tersebut output yang dihasilkan tahun 2024 antara lain:

- Dokumen RPJPD tahun 2025-2045
- Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025
- Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2023
- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SIMAKIP)
- Aplikasi JARI BANTEN (untuk memfasilitasi Inovasi Daerah)
- Laporan Evaluasi Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2024
- Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024

Adapun outcome dari kinerja Bappeda adalah:

1. Meningkatnya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah Provinsi Banten
2. Tercapainya kesesuaian dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
3. Tercapainya kesesuaian dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan daerah Kabupaten/Kota
4. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah

Dampak ke masyarakat:

1. Dokumen perencanaan sesuai dengan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah
2. Meningkatnya sinergitas pembangunan Pemerintah Provinsi Banten dengan Kabupaten kota se Provinsi Banten
3. Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir yaitu tahun 2021 dan tahun 2022

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024		
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
I	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegrasi, berkompetensi serta melayani.							
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Penilaian Perencanaan Pengukuran, pelaporan dan capaian kinerja	83,59	73,6	82	70	70,15	85,18

2	Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	75	75	42.19	47	43,35	78,40
3	Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Cakupan Penelitian dan pengembangan	100	100	Inovatif	60 (sangat inovatif)	45,57 (inovatif)	76,50

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegrasi, berkompetensi serta melayani.				
1	Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	70,15	81	86,6
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Capaian Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	43,35	51	84,31
3	Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Cakupan Penelitian dan pengembangan	45,57 (inovatif)	60 (sangat Inovatif)	75,95

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Nasional.

Sasaran Program Kegiatan pada anggaran belanja daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten disandingkan dengan Provinsi lainnya

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Provinsi Banten	Provinsi DKI Jakarta	Provinsi Jawa Barat	Nasional
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	B	A	A	Tidak ada Nilai SAKIP Nasional
2	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian pengembangan dan penerapan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	45,57 Inovatif	80,18 Sangat Inovatif	81,27 Sangat Inovatif	Tidak ada Nilai Indeks Inovasi Nasional

- Dokumen Kepmendagri Hasil Penilaian Indeks Inovasi daerah terlampir

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan dari Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilakukan Bappeda tahun 2024 didukung oleh faktor :

1. Sumberdaya Manusia (SDM) Bappeda yang berkompeten
2. Optimalnya koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sinergisitas dengan Kabupaten/Kota

Sedangkan faktor penghambat atau kendala dari pelaksanaan program pembangunan daerah yang dilakukan Bappeda yaitu:

1. Dinamika kebijakan pusat yg berubah
2. Deadline waktu perumusan dokumen perencanaan sangat terbatas

Upaya perbaikan dan tindak lanjut ke depan yaitu dengan meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antar bidang di Bappeda sehingga perumusan dokumen perencanaan tepat waktu dan dapat mengakomodir semua stake holder yang mempunyai peran dalam pembangunan daerah.



3.1.6 Analisis Program /Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
 Analisis program /kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Sasaran, Program dan Kegiatan

TUJUAN/SASARAN	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	ANALISIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegrasi, berkompetensi serta melayani							
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien		Capaian Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	70	70,15	85,18	menunjang	Bappeda telah mencapai 85,18 pada penilaian SAKIP OPD. Hal merupakan keberhasilan dalam mengimplemetasikan komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	97.03	97.03	Tidak menunjang	Perlu meningkatkan kualitas evaluasi internal
	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	87,24	87,24	Tidak menunjang	Perlu meningkatkan kualitas dialog kinerja dalam penyusunan perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja serta optimalisasi evaluasi internal
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	98,68	98..68 %	Tidak menunjang	Perlu meningkatkan kualitas pengelolaan / tata usaha keuangan sebagai pendukung operasional lancarnya kegiatan
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	80,77	80,77	Tidak menunjang	Pengelolaan barang milik daerah di Bappeda perlu memetakan barang yang sudah tidak fungsional dan bisa ditindaklanjuti dengan penghapusan aset
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	87,89	87,89	Tidak menunjang	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	97.03	97.03	Tidak menunjang	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	92,71	92,71	Tidak menunjang	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	83,21	83,21	tidak menunjang	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100	97,69	97,69 %	tidak menunjang	Pengelolaan sumberdayan aparatur perlu dilakukan perbaikan dalam peningkatan kualitas budaya kerja dan implementasi system kerja baru
Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas		Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian	47	43,35	78,40	Menunjang	Bappeda memperkuat 2 aspek dalam komponen SAKIP yaitu Perencanaan dan Pengukuran sesuai dengan Permenpan 88 tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP dan Berdasarkan LHE AKIP MENPAN RB belum terdapat beberapa isu strategis yang belum sinergi dengan program prioritas
	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen Pengendalian dan evaluasi yang disusun sesuai target dalam satu tahun	100	86,45	86,45	Menunjang	Perlu meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan daerah yang berdasarkan permasalahan pembangunan
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	86,45	86,45	Menunjang	Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang akan datang
		Presentase Konsistensi Program RPJMD/ RPD kedalam RKPD	100	92,39	92,39	Menunjang	

	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100	92,39	92,39	Menunjang	Perlu meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan daerah yang berdasarkan permasalahan pembangunan
		Persentase Ketersediaan data perencanaan pembangunan	100	82,56	82,56	Menunjang	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	82,56	82,56	Menunjang	Perlu meningkatkan kualitas koordinasi pengumpulan data dan informasi baik dengan perangkat daerah maupun dengan Lembaga lainnya
		Persentase pengelolaan sistem informasi pembangunan dan pengendalian daerah	100	82,56	82,56	Menunjang	
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100 %	82,56	82,56	Menunjang	Perlu meningkatkan kualitas koordinasi pengumpulan data dan informasi baik dengan perangkat daerah maupun dengan Lembaga lainnya
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsisten Dengan RPJMD/RPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	90,57	90,57	Menunjang	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	90,57	90,57	Menunjang	Perlu meningkatkan analisis permasalahan pembangunan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan baik dalam proses perencanaan maupun dalam sinkronisasi dokumen lainnya

		Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD/RPD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	83,86	83,86	Menunjang	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	83,86	83,86	Menunjang	Perlu meningkatkan analisis permasalahan pembangunan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia baik dalam proses perencanaan maupun dalam sinkronisasi dokumen lainnya
		Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsisten Dengan RPJMD/RPD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	90,34	90,34	Menunjang	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	90,34	90,34	Menunjang	Perlu meningkatkan analisis permasalahan pembangunan di bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) baik dalam proses perencanaan maupun dalam sinkronisasi dokumen lainnya
Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas		Dokumen Perencanaan Daerah Cakupan Penelitian dan pengembangan	60 (sangat Inovatif)	45,57 (inovatif)	76,50	Menunjang	Evidence diinput OPD kurang lengkap dan Provinsi lain berkompetensi ketat dalam pencapaian Indeks Inovasi Daerah
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan lingkup Ekonomi dan Pembangunan yang dihasilkan	100	90,15	90,15	Menunjang	

	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100	90,15	90,15	Menunjang	Hasil Kajian bidang ekonomi dan pembangunan belum dapat memberikan input yang optimal dalam penyelesaian permasalahan pembangunan
		Persentase hasil kelitbangan lingkup Sosial dan Kependudukan yang dihasilkan	100	91,83	91,83	Menunjang	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100	91,83	91,83	Menunjang	Optimalisasi Hasil Kajian terkait sosial dan kependudukan belum dimanfaatkan secara optimal dalam penyusunan perencanaan daerah
		Persentase Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Inovasi, Teknologi dan Hasil Kelitbangan	100	91,23	91,23	Menunjang	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100	91,23	91,23	Menunjang	Perlu dilakukan optimalisasi pendampingan kepada perangkat daerah dalam pengembangan inovasi dan teknologi
		Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	93,85	93,85	Menunjang	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100	93,85	93,85	Menunjang	Hasil Kajian terkait kebijakan daerah perlu disampaikan secara terstruktur kepada pimpinan sebagai perbaikan pengambilan keputusan

3.1.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya Anggaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Effisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegrasi, berkompetensi serta melayani.								
	Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	100%	100%	100%	42.811.374.644,00	41.607.166.152,00	97,19	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Capaian Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	100%	100%	100%	10.113.604.280,00	8.982.945.181,00	88,82	
	Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Cakupan Penelitian dan pengembangan	100%	100%	100%	1.045.950.500,00	981.608.000,00	93,85	
					(	44	)		

Jika di melihat dari Penyerapan realisasi Anggaran BAPPEDA sebesar 95,44% pada Desember 2024 dan melihat capaian kinerja rata-rata pada aplikasi SAKIP 2024 sebesar 70,15%, Maka anggaran telah cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kinerja BAPPEDA tahun 2024.

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya Manusia disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8 Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) tahun 2024

No	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	UNIT KERJA
1	2	3	4	5
1	Dr. Mahdani, SE, ST, M.Si, MM	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	ILMU EKONOMI	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Sugeng Haryadi, SE, MM	Plt Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	ADMINISTRASI NEGARA	Sekretariat
3	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Administrasi Pemerintahan Daerah	Sekretariat
4	Chaerina, SE, MM	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	MANAJEMEN	Sekretariat
5	Dadi Supriadi, SH, MH	Perencana Ahli Muda	Ilmu Hukum	Sekretariat
6	Sulistiyawan, S.Si, MM	Perencana Ahli Pertama	Manajemen	Sekretariat
7	Sri Lestari, S.Sos, M.Si	Penelaah Teknis Kebijakan	Administrasi Pemerintahan Daerah	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8	lim Naima Tuhanim, SE	Pengolah Data dan Informasi	MANAJEMEN	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
9	Andy Kusuma, ST	Penelaah Teknis Kebijakan	ARSITEKTUR	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
10	Nandang, S.Sos, MM	Penelaah Teknis Kebijakan	ADMINISTRASI NEGARA	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11	Indra Rosyandi, ST, M.Si	Penelaah Teknis Kebijakan	Administrasi Pemerintahan Daerah	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
12	Mohammad Latif, SE	Pengolah Data dan Informasi	AKUNTANSI	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
13	Mila Yuniar, SE	Pengolah Data dan Informasi	MANAJEMEN	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
14	Slamet Fakhruddin, SE	Bendahara	MANAJEMEN	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
15	Devi Arifiadi Arifin, S.AP, MA	Penelaah Teknis Kebijakan	Ilmu Administrasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
16	Dian Fathalina, SE	Pengolah Data dan Informasi	Manajemen Sumber Daya Manusia	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	UNIT KERJA
17	Jettyako Warisam, ST	Penelaah Teknis Kebijakan	TEKNIK INFORMATIKA	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
18	R.A. Intan Permata Sari, ST	Penata Layanan Operasional	TEKNIK PLANOLOGI	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
19	Eka Yanti, A.Md	Pengolah Data dan Informasi	MANAJEMEN INFORMATIKA	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
20	Wawan Hendrawan	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	SLTA Umum	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
21	Arief Kautsar Setyawan, ST, MT	Plt. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	MAGISTER TEKNIK SIPIL	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
22	Alex Fransisca, ST, MT	Perencana Ahli Madya	Perencanaan Wilayah dan Kota	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
23	Ida Taurusida, SE, M.Si	Perencana Ahli Muda	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
24	Indah Damayanti, ST, M.M, M.T	Perencana Ahli Muda	Kimia	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
25	Ainul Hayati, S.Kom, ME	Perencana Ahli Muda	Ilmu Perencanaan dan Kebijakan Publik	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
26	Uly Yuliana Rosa Indah, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan	ADMINISTRASI NEGARA	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
27	Andi Supyani, ST, M.Si	Penelaah Teknis Kebijakan	Ilmu Administrasi	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
28	Rini Agustini, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	ILMU EKONOMI	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
29	Rd. Rara Eulis Hendraswati, ST, ME	Perencana Ahli Muda	KEBIJAKAN PUBLIK	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
30	Ryan Arief Munandar, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan	Administrasi Negara	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
31	Devi Triady Bachrudin, SP, MAP	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Administrasi Publik	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
32	Meli Mardiani, SE	Pengolah Data dan Informasi	Manajemen	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan



No	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	UNIT KERJA
33	Ucu Hanapi, S.Si, M.M	Perencana Ahli Pertama	FISIKA	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
34	Agus Santoso Effendi Guruh Agung, ST, MT	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	STUDI PEMBANGUNAN	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
35	Dr. Endang Supriadi, S.Ag, SH, MM	Perencana Ahli Muda	Manajemen Sumber Daya Manusia	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
36	Westy Megawati Gumilang, S.Psi, M.Si	Perencana Ahli Muda	ILMU ADMINISTRASI	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
37	Ira Sofia Mariana, S.Sos, MM	Penelaah Teknis Kebijakan	Manajemen Pemasaran	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
38	Lelih Herawati, S.KM, M.Kes	Perencana Ahli Muda	Manajemen Kesehatan	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
39	Topan Solihin, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	MANAJEMEN	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
40	Anita Widiastuti, S.STP, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Ilmu Ekonomi	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
41	Nurlelah, S.Kom	Penelaah Teknis Kebijakan	TEKNIK INFORMATIKA	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
42	Mochamad Nurhestitunggal, S.IP, M.DP	Penelaah Teknis Kebijakan	Pasca Sarjana	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
43	Yeyet Mulyawati, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	Manajemen	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
44	John Apriyono, ST	Penelaah Teknis Kebijakan	Teknik Sipil	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
45	Bani Adi Dharma, S.Sos, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda	ADMINISTRASI PUBLIK	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
46	Rini Purwito Sari, SE, M.M	Penelaah Teknis Kebijakan	Manajemen Keuangan	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
47	Ardi Wibawa, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	Manajemen	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
48	Akhmad Jonny Irawan, S.Pd	Analisis Perencanaan	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
49	Rizal Puji Illahi, S.Tr.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Ilmu Pemerintahan	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	UNIT KERJA
50	Ucu Syahbana	Pengolah Data	IPS	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
51	Zaenal Mutaqin, SE, MSE, M.Sc, PhD	Kepala Bidang Perencanaan, Data, dan Sistem Informasi Pembangunan	Doktor	Bidang Perencanaan, Data, dan Sistem Informasi Pembangunan
52	Ahmad Jalaludin, S.ST, M.Eng	Perencana Ahli Muda	Ilmu Perencanaan Kota & Daerah	Bidang Perencanaan, Data, dan Sistem Informasi Pembangunan
53	Rizal Marthias, S.STP, M.Si	Perencana Ahli Muda	ILMU PEMERINTAHAN	Bidang Perencanaan, Data, dan Sistem Informasi Pembangunan
54	Amalia Itani Warganegara, ST, MT	Perencana Ahli Muda	Studi Pembangunan	Bidang Perencanaan, Data, dan Sistem Informasi Pembangunan
55	Siti Rohayati, S.Sos, M.A.P.	Penelaah Teknis Kebijakan	Administrasi Publik	Bidang Perencanaan, Data, dan Sistem Informasi Pembangunan
56	Yenni, ST, MM	Penelaah Teknis Kebijakan	Pasca Sarjana	Bidang Perencanaan, Data, dan Sistem Informasi Pembangunan
57	Naman, S.Ag, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Manajemen Sumber Daya Manusia	Bidang Perencanaan, Data, dan Sistem Informasi Pembangunan
58	Rodrigo Singgit Singh, S.Si, MM	Perencana Ahli Muda	Manajemen	Bidang Perencanaan, Data, dan Sistem Informasi Pembangunan
59	Nindi Dewi Purwantini, A.Md, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	MANAJEMEN	Bidang Perencanaan, Data, dan Sistem Informasi Pembangunan
60	Ade Afiati, S.Si	Perencana Ahli Pertama	MATEMATIKA DAN IPA	Bidang Perencanaan, Data, dan Sistem Informasi Pembangunan
61	Ginanjari Hidayatullah, S.T, M.PSDA	Penelaah Teknis Kebijakan	Pengelolaan 49 Sumberdaya Air	Bidang Perencanaan, Data, dan Sistem Informasi Pembangunan
62	Muhammad Yudha Ramdhani, ST	Penelaah Teknis Kebijakan	Teknik Lingkungan	Bidang Perencanaan, Data, dan Sistem Informasi Pembangunan
63	Desta Munggara, ST	Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan	TEKNIK PLANOLOGI	Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan
64	Ibnu Uhi, S.Sos, MM	Perencana Ahli Muda	ADMINISTRASI NEGARA	Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan
65	Hj. Iis Ismatul, S.Ag, MM	Perencana Ahli Muda	Manajemen Sumber Daya Manusia	Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan

No	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	UNIT KERJA
66	Hj. Eva Nurhayati, SE, MM	Penelaah Teknis Kebijakan	MAGISTER MANAGEMENT	Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan
67	Dini Wulandari, S.Sos, M.Si	Penelaah Teknis Kebijakan	Ilmu Administrasi	Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan
68	Endang Fahruliyati, S.I.Kom, MA	Penelaah Teknis Kebijakan	Ilmu Administrasi	Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan
69	Alif Ahmad Angga Kusumah, ST, M.Si	Penelaah Teknis Kebijakan	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan
70	Subki, ST, M.A.P	Perencana Ahli Muda	Administrasi Publik	Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan
71	Silfiana, S.IP, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda	ILMU ADMINISTRASI	Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan
72	Agil Ardiansyah Maulana, S.Tr.I.P	Fasilitator Pemerintahan	Ilmu Pemerintahan	Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan
73	Didi Hadiyatna, SE, MM	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah	Manajemen	Bidang Riset dan Inovasi Daerah
74	Dr. Muhlisin, S.Pd, M.Si	Peneliti Ahli Madya	Ilmu Lingkungan	Bidang Riset dan Inovasi Daerah
75	Iwan Budiawan Arifin, S.Kom, M.Si	Peneliti Ahli Muda	Administrasi Pemerintahan Daerah	Bidang Riset dan Inovasi Daerah
76	Deden Hudaedin, SE	Peneliti Ahli Muda	MANAJEMEN	Bidang Riset dan Inovasi Daerah
77	Ahmad Hidayatullah, SE, MM	Penelaah Teknis Kebijakan	MAGISTER MANAJEMEN	Bidang Riset dan Inovasi Daerah
78	Moh. Sofyan Budiarto, S.Hut, MM	Peneliti Ahli Muda	MAGISTER MANAGEMENT	Bidang Riset dan Inovasi Daerah
79	Yunia Rahayuningsih, S.Pi, MAP	Peneliti Ahli Muda	Administrasi Publik	Bidang Riset dan Inovasi Daerah
80	Oki Oktaviana, S.Pi, MAP	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Ilmu Administrasi	Bidang Riset dan Inovasi Daerah
81	Yusniah Anggraini, S.KM	Peneliti Ahli Muda	KESEHATAN MASYARAKAT	Bidang Riset dan Inovasi Daerah
82	Deni Setiawan, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	MANAJEMEN	Bidang Riset dan Inovasi Daerah
83	Guntur Fernanto, S.KM, M.A.P	Peneliti Ahli Pertama	Administrasi Publik	Bidang Riset dan Inovasi Daerah
84	Devi Meira Widya, A.Md	Pengolah Data dan Informasi	MANAJEMEN INFORMATIKA	Bidang Riset dan Inovasi Daerah
85	Aji Agus Permadi, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	Manajemen	Bidang Riset dan Inovasi Daerah
86	Deni Santoso, S.STP	Penelaah Teknis Kebijakan	Politik Pemerintahan	Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Jika melihat total sumber daya manusia pada BAPPEDA sebesar 169 orang, terdiri dari ASN sebesar 86 orang dan Non ASN sebesar 83 orang, dan membandingkan Jumlah Total Pegawai menurut Peraturan Gubernur Banten Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kinerja Pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten terdiri dari jabatan pimpinan tinggi 1 orang, jabatan administrator 6 orang, jabatan Pengawas 1 orang, jabatan pelaksana 43 orang dan jabatan fungsional tertentu 36 orang.

Analisis dari tabel pada Sasaran SAKIP OPD ada Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD merupakan indikator kinerja utama (IKU) yang diampu oleh Kepala Bappeda. Nilai Laporan Kinerja TA 2023 berdasarkan hasil revidi Inspektorat memperoleh nilai 70,15 dengan kategori BB (baik).

3.2 REALISASI ANGGARAN

3.2.1 Pagu Dan Realisasi Anggaran

Ringkasan Dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai Belanja, sebagai berikut.

Tabel 3.9 Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja & Anggaran		Realisasi Kinerja & Realisasi Anggaran	
	Output	Rp	Output	Rp
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		55.234.702.890,00		52.718.133.783,00
PERENCANAAN		52.924.978.924,00		50.590.111.333,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		42.811.374.644,00		41.607.166.152,00
	100,00	42.811.374.644,00	99,24	41.607.166.152,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	500.085.900,00	91,16	436.260.500,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,00	378.869.700,00	4,00	323.845.500,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2,00	13.100.000,00	2,00	12.687.500,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	2,00	7.940.000,00	2,00	7.662.500,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,00	8.000.000,00	2,00	7.700.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2,00	8.000.000,00	2,00	7.700.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00	27.828.000,00	12,00	27.050.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,00	56.348.200,00	5,00	49.615.000,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja & Anggaran		Realisasi Kinerja & Realisasi Anggaran	
	Output	Rp	Output	Rp
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	33.138.057.000,00	99,59	32.700.880.892,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	89,00	32.767.807.000,00	89,00	32.334.278.392,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,00	353.215.000,00	12,00	351.250.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	3.650.000,00	12,00	3.430.000,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1,00	250.000,00	1,00	240.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00	3.050.000,00	1,00	2.885.000,00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1,00	750.000,00	1,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18,00	9.125.000,00	18,00	8.602.500,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,00	210.000,00	1,00	195.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,00	11.868.960,00	100,00	9.586.700,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2,00	1.683.520,00	2,00	1.440.000,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,00	5.352.960,00	4,00	3.600.000,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,00	4.832.480,00	2,00	4.546.700,00
	2,00	4.832.480,00	2,00	4.546.700,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	222.113.600,00	81,77	216.975.380,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	90,00	97.600.000,00	90,00	97.204.000,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1,00	4.425.600,00	1,00	4.091.500,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	163,00	120.088.000,00	163,00	115.679.880,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	1.708.822.980,00	99,94	1.421.951.130,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,00	63.874.900,00	1,00	60.680.750,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,00	476.096.100,00	4,00	439.009.300,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,00	153.869.000,00	4,00	135.990.100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12,00	364.000.000,00	12,00	338.760.000,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja & Anggaran		Realisasi Kinerja & Realisasi Anggaran	
	Output	Rp	Output	Rp
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,00	210.352.280,00	2,00	195.791.850,00
Penyediaan Bahan/Material	1,00	29.412.700,00	1,00	28.213.600,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00	38.572.000,00	12,00	37.655.200,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	321.672.000,00	12,00	162.150.330,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,00	4.200.000,00	1,00	4.200.000,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1,00	46.774.000,00	1,00	19.500.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	522.567.000,00	50,00	459.308.640,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,00	222.567.000,00	13,00	161.300.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2,00	300.000.000,00	2,00	298.008.640,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	3.317.878.280,00	99,86	3.219.415.282,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00	15.934.400,00	12,00	14.593.500,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,00	374.094.200,00	12,00	342.735.362,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,00	84.624.000,00	12,00	79.206.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,00	2.843.225.680,00	12,00	2.782.880.420,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	3.389.980.924,00	100,00	3.142.787.628,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7,00	281.656.400,00	7,00	260.329.870,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64,00	1.167.448.100,00	64,00	971.840.008,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	207,00	172.305.000,00	207,00	165.075.950,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,00	281.962.000,00	2,00	279.425.600,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,00	1.486.609.424,00	1,00	1.466.116.200,00
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		6.555.520.280,00		5.908.557.824,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja & Anggaran		Realisasi Kinerja & Realisasi Anggaran	
	Output	Rp	Output	Rp
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	2.204.170.000,00	96,91	1.905.488.624,00
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	12,00	1.188.277.350,00	12,00	1.004.599.524,00
Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	1,00	266.269.850,00	1,00	185.716.500,00
	1,00	266.269.850,00	1,00	185.716.500,00
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2,00	50.000.000,00	2,00	47.981.100,00
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	19,00	699.622.800,00	19,00	667.191.500,00
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100,00	1.227.908.000,00	51,91	1.134.470.000,00
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	3,00	629.208.000,00	3,00	601.095.000,00
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	4,00	598.700.000,00	4,00	533.375.000,00
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	686.628.000,00	94,67	566.862.000,00
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2,00	143.135.000,00	2,00	102.079.500,00
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	100,00	152.854.000,00	100,00	141.578.000,00
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	16,00	166.606.000,00	16,00	121.594.000,00
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	1,00	224.033.000,00	1,00	201.610.500,00
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100,00	612.395.280,00	58,82	599.821.200,00
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1,00	193.515.280,00	1,00	191.533.700,00
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1,00	399.600.000,00	1,00	396.645.000,00
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	1,00	19.280.000,00	1,00	11.642.500,00
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100,00	1.824.419.000,00	63,08	1.701.916.000,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja & Anggaran		Realisasi Kinerja & Realisasi Anggaran	
	Output	Rp	Output	Rp
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	6,00	722.800.000,00	6,00	620.811.500,00
Pelaksanaan Konsultasi Publik	1,00	264.095.000,00	1,00	261.944.500,00
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1,00	30.500.000,00	1,00	28.850.000,00
Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	2,00	807.024.000,00	2,00	790.310.000,00
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		3.558.084.000,00		3.074.387.357,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100,00	555.022.000,00	97,04	502.709.950,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2,00	74.426.000,00	2,00	68.988.850,00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2,00	32.500.000,00	2,00	31.525.000,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4,00	205.488.000,00	4,00	179.306.000,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1,00	94.890.000,00	1,00	79.521.000,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2,00	21.084.000,00	2,00	20.690.000,00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2,00	21.324.000,00	2,00	20.990.000,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4,00	72.924.000,00	4,00	72.299.800,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1,00	32.386.000,00	1,00	29.389.300,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00	2.180.000.000,00	79,69	1.828.092.151,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2,00	126.173.000,00	2,00	121.137.500,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja & Anggaran		Realisasi Kinerja & Realisasi Anggaran	
	Output	Rp	Output	Rp
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2,00	15.140.000,00	2,00	11.625.000,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4,00	48.884.000,00	4,00	42.889.500,00
	4,00	48.884.000,00	4,00	42.889.500,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	5,00	554.803.000,00	5,00	517.748.645,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4,00	149.272.000,00	4,00	128.705.000,00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4,00	57.448.000,00	4,00	47.682.500,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8,00	195.306.800,00	8,00	146.258.000,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7,00	1.032.973.200,00	7,00	812.046.006,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100,00	823.062.000,00	83,28	743.585.256,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2,00	19.488.000,00	2,00	14.925.000,00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2,00	10.988.000,00	2,00	9.125.000,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4,00	124.410.000,00	4,00	114.095.500,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	4,00	207.114.000,00	4,00	186.253.800,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4,00	82.260.000,00	4,00	76.377.400,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja & Anggaran		Realisasi Kinerja & Realisasi Anggaran	
	Output	Rp	Output	Rp
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2,00	58.434.000,00	2,00	57.044.400,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6,00	195.316.000,00	6,00	180.529.525,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	4,00	125.052.000,00	4,00	105.234.631,00
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		2.309.723.966,00		2.128.022.450,00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		2.309.723.966,00		2.128.022.450,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100,00	666.516.400,00	11,83	600.852.850,00
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1,00	50.000.000,00	1,00	37.650.850,00
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1,00	50.000.000,00	1,00	38.279.850,00
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	5,00	566.516.400,00	5,00	524.922.150,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100,00	114.702.000,00	72,77	105.330.000,00
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1,00	114.702.000,00	1,00	105.330.000,00
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100,00	482.555.066,00	48,50	440.231.600,00
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1,00	175.000.000,00	1,00	165.570.000,00
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2,00	175.000.000,00	2,00	161.198.600,00
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1,00	75.000.000,00	1,00	65.507.000,00
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1,00	57.555.066,00	1,00	47.956.000,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100,00	1.045.950.500,00	94,58	981.608.000,00
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	3,00	895.950.500,00	3,00	851.188.300,00
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1,00	50.000.000,00	1,00	36.701.500,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja & Anggaran		Realisasi Kinerja & Realisasi Anggaran	
	Output	Rp	Output	Rp
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1,00	50.000.000,00	1,00	47.093.500,00
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	2,00	50.000.000,00	2,00	46.624.700,00
		55.234.702.890,00		52.718.133.783,00

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategik diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Effisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dam sumber daya aparatur berintegrasi, berkompetensi serta melayani.								
	Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	47	43,35	92,23%	42.811.374.644,00	41.607.166.152,00	97,19	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Capaian Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	70	70,15	98,80%	10.113.604.280,00	8.982.945.181,00	88,82	
	Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Cakupan Penelitian dan pengembangan	60 (sangat inovatif)	45,57 (inovatif)	75,95%	1.045.950.500,00	981.608.000,00	93,85 %	

Tabel 3.2.3 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Rp	Rp	Capaian
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					55.234.702.890	52.718.133.783	
PERENCANAAN					52.924.978.924	50.590.111.333	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					42.811.374.644	41.607.166.152	
	1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	99,24	99,24	42.811.374.644	41.607.166.152	97,19
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	91,16	91,16	500.085.900	436.260.500	87,24
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	4	80	378.869.700	323.845.500	85,48
	1 Rencana Kerja (RENJA) 2025	1	1	100	47.490.000	42.935.000	90,41
	2 Rencana Kerja (RENJA) Perubahan 2024	1	1	100	4.980.600	2.130.000	42,77
	3 Penyusunan Perencanaan TKPK	1	1	100	254.660.500	215.238.500	84,52
	4 SEPAKAT BAPPENAS	1	1	100	71.738.600	63.542.000	88,57
	5 Penyusunan RPKD TKPK Tahun 2025-2030	0	0	0	0	0	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	100	13.100.000	12.687.500	96,85
	1 RKA Penyempurnaan 2025	1	1	100	2.500.000	8.687.500	347,50
	2 RKA Finalisasi 2025	1	1	100	10.600.000	4.000.000	37,74
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	100	7.940.000	7.662.500	96,51
	1 Perubahan RKA Penyempurnaan 2024	1	1	100	2.500.000	2.500.000	100,00
	1 Perubahan RKA Finalisasi 2024	1	1	100	5.440.000	5.162.500	94,90
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	100	8.000.000	7.700.000	96,25
	1 DPA Penyempurnaan 2025	1	1	100	2.500.000	2.500.000	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Rp	Rp	Capaian
	2 DPA Finalisasi 2025	1	1	100	5.500.000	5.200.000	94,55
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	100	8.000.000	7.700.000	96,25
	1 Perubahan DPA Penyempurnaan 2024	1	1	100	2.500.000	2.500.000	100,00
	2 Perubahan DPA Finalisasi 2024	1	1	100	5.500.000	5.200.000	94,55
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	12	12	100	27.828.000	27.050.000	97,20
	1 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	100	27.828.000	27.050.000	97,20
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	100	56.348.200	49.615.000	88,05
	1 LPPD, LKPJ dan LKiP	1	1	100	8.664.000	8.000.000	92,34
	2 Reformasi Birokrasi	1	1	100	16.780.000	16.200.000	96,54
	3 SPIP	1	1	100	13.332.000	9.590.000	71,93
	4 Daftar Penilaian Resiko (DPR)	1	1	100	11.248.000	9.825.000	87,35
	5 Evaluasi Kinerja Tahunan	1	1	100	6.324.200	6.000.000	94,87
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah	100	99,59	99,59	33.138.057.000	32.700.880.892	98,68
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89	89	100	32.767.807.000	32.334.278.392	98,68
	1 Penyusunan Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan	89	89	100	32.767.807.000	32.334.278.392	98,68
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	100	353.215.000	351.250.000	99,44
	1 Penyusunan Dokumen Laporan Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	12	100	353.215.000	351.250.000	99,44
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100	3.650.000	3.430.000	93,97
	1 Penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100	3.650.000	3.430.000	93,97

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Rp	Rp	Capaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	100	250.000	240.000	96,00
	1 Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	100	250.000	240.000	96,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100	3.050.000	2.885.000	94,59
	1 Penyusunan Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100	3.050.000	2.885.000	94,59
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	100	750.000	0	0,00
	1 Penyusunan Dokumen Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1	1	100	750.000	0	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	100	9.125.000	8.602.500	94,27
	1 Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan dan Semester SKPD	18	18	100	9.125.000	8.602.500	94,27
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	100	210.000	195.000	92,86
	1 Penyusunan Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	100	210.000	195.000	92,86
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	11.868.960	9.586.700	80,77
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	100	1.683.520	1.440.000	85,54
	1 Penyusunan Dokumen RKBMD dan RKPBM Tahun 2025 dan Penyusunan Dokumen RKBMD dan RKPBM Perubahan Tahun 2024	2	2	100	1.683.520	1.440.000	85,54
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	100	5.352.960	3.600.000	67,25
	1 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	100	5.352.960	3.600.000	67,25

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Rp	Rp	Capaian
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	100	4.832.480	4.546.700	94,09
	1 Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	100	4.832.480	4.546.700	94,09
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100	81,77	81,77	222.113.600	216.975.380	97,69
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	90	90	100	97.600.000	97.204.000	99,59
	1 umlah Pengadaan Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	90	90	100	97.600.000	97.204.000	99,59
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	100	4.425.600	4.091.500	92,45
	1 Penyusunan Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	100	4.425.600	4.091.500	92,45
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	163	163	100	120.088.000	115.679.880	96,33
	1 Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan danPelatihan	6	6	100	45.000.000	56.000.000	124,44
	2 Peningkatan Kompetensi Sumber daya Manusia Internal Bappeda	157	157	100	75.088.000	59.679.880	79,48
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	100	99,94	99,94	1.708.822.980	1.421.951.130	83,21
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100	63.874.900	60.680.750	95,00
	1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	1	100	63.874.900	60.680.750	95,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	100	476.096.100	439.009.300	92,21
	1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	100	476.096.100	439.009.300	92,21
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4	100	153.869.000	135.990.100	88,38
	1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4	100	153.869.000	135.990.100	88,38

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Rp	Rp	Capaian
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	100	364.000.000	338.760.000	93,07
	1 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	100	364.000.000	338.760.000	93,07
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	100	210.352.280	195.791.850	93,08
	1 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	100	210.352.280	195.791.850	93,08
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	100	29.412.700	28.213.600	95,92
	1 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	100	29.412.700	28.213.600	95,92
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	100	38.572.000	37.655.200	97,62
	1 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	100	38.572.000	37.655.200	97,62
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100	321.672.000	162.150.330	50,41
	1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100	321.672.000	162.150.330	50,41
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	100	4.200.000	4.200.000	100,00
	1 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	100	4.200.000	4.200.000	100,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	100	46.774.000	19.500.000	41,69
	1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	100	46.774.000	19.500.000	41,69
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	50	50	522.567.000	459.308.640	87,89
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14	13	92,85714286	222.567.000	161.300.000	72,47
	1 Peralatan Studio Video dan Film Spesifikasi: Sound System R. Rapat Pimpinan(Pusat) Stand Mic, Micwirelles, Speker Pasif (BMB), PowerMixer (14 Channel),Braket Speker,Kabel Speker 40M, Speckon,	14	13	92,85714286	222.567.000	161.300.000	72,47

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Rp	Rp	Capaian
	Kabel						
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	2	100	300.000.000	298.008.640	99,34
	1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	2	100	300.000.000	298.008.640	99,34
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	99,86	99,86	3.317.878.280	3.219.415.282	97,03
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100	15.934.400	14.593.500	91,58
	1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100	15.934.400	14.593.500	91,58
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100	374.094.200	342.735.362	91,62
	1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100	374.094.200	342.735.362	91,62
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	100	84.624.000	79.206.000	93,60
	1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	100	84.624.000	79.206.000	93,60
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100	2.843.225.680	2.782.880.420	97,88
	1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100	2.843.225.680	2.782.880.420	97,88
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	3.389.980.924	3.142.787.628	92,71
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7	7	100	281.656.400	260.329.870	92,43
	1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7	7	100	281.656.400	260.329.870	92,43

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Rp	Rp	Capaian
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64	64	100	1.167.448.100	971.840.008	83,24
	1 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64	64	100	1.167.448.100	971.840.008	83,24
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	207	207	100	172.305.000	165.075.950	95,80
	1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	207	207	100	172.305.000	165.075.950	95,80
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	100	281.962.000	279.425.600	99,10
	1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	100	281.962.000	279.425.600	99,10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100	1.486.609.424	1.466.116.200	98,62
	1 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100	1.486.609.424	1.466.116.200	98,62
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					6.555.520.280	5.908.557.824	90
	1 Persentase dokumen Pengendalian dan evaluasi yang disusun sesuai target dalam satu tahun	100	100	100	2.204.170.000	1.905.488.624	86,45
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	96,91	96,91	2.204.170.000	1.905.488.624	86,45
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	12	12	100	1.188.277.350	1.004.599.524	84,54
	1 Penyusunan Dokumen LKPJ	1	1	100	183.450.000	136.029.340	74,15
	2 Penyusunan Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun 2023	1	1	100	30.000.000	30.000.000	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Rp	Rp	Capaian
	3 Penyusunan Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan APBN Provinsi Tahun 2023	1	1	100	25.000.000	25.000.000	100,00
	4 Penyusunan Dokumen Laporan Triwulanan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun 2024	3	3	100	603.537.350	489.396.644	81,09
	5 Penyusunan Dokumen Laporan Triwulanan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan APBN Provinsi Tahun 2024	3	3	100	127.250.000	107.773.540	84,69
	6 Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Penjabat Provinsi Banten	3	3	100	219.040.000	216.400.000	98,79
Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1	1	100	266.269.850	185.716.500	69,75
	1 Penyusunan Laporan Kerjasama Daerah	1	1	100	266.269.850	185.716.500	69,75
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2	2	100	50.000.000	47.981.100	95,96
	1 Penyusunan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan tematik pembangunan daerah	2	2	100	50.000.000	47.981.100	95,96
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	19	19	100	699.622.800	667.191.500	95,36
	1 Evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	2	2	100	67.840.000	57.240.000	84,38
	2 Fasilitasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	8	8	100	107.300.000	107.300.000	100,00
	3 Fasilitasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota TA, 2025	1	1	100	90.050.000	90.050.000	100,00
	4 Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan APBN Kabupaten/Kota TA. 2023	1	1	100	35.430.000	35.650.000	100,62
	5 Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota TA. 2023	1	1	100	45.900.000	34.100.000	74,29
	6 Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan APBN Kabupaten/Kota TA. 2024 (3 Triwulan)	3	3	100	78.248.000	67.996.700	86,90
	7 Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota TA. 2024 (3 Triwulan)	3	3	100	274.854.800	274.854.800	100,00
	2 Persentase dokumen perencanaan yang disahkan	100	100	100	1.227.908.000	1.134.470.000	92,39

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Rp	Rp	Capaian
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100	51,91	51,91	1.227.908.000	1.134.470.000	92,39
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	3	3	100	629.208.000	601.095.000	95,53
	1 Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Banten	1	1	100	271.213.000	261.300.000	96,34
	2 Penyusunan Dokumen Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2026	1	1	100	126.500.000	120.545.000	95,29
	3 Penyusunan Dokumen RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045	1	1	100	231.495.000	219.250.000	94,71
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4	4	100	598.700.000	533.375.000	89,09
	1 Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2025	1	1	100	166.250.000	146.050.000	87,85
	2 Penyusunan Dokumen RPJPD 2025-2045	1	1	100	183.220.000	147.425.000	80,46
	3 Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024	1	1	100	219.230.000	209.900.000	95,74
	4 Penyusunan Laporan Tenaga Operator Komputer	1	1	100	30.000.000	30.000.000	100,00
	3 Persentase Ketersediaan data perencanaan pembangunan	100	100	100	686.628.000	566.862.000	82,56
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	94,67	94,67	686.628.000	566.862.000	82,56
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2	2	100	143.135.000	102.079.500	71,32
	1 Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2	2	100	143.135.000	102.079.500	71,32
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	100	100	100	152.854.000	141.578.000	92,62

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Rp	Rp	Capaian
	1 Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	100	100	100	152.854.000	141.578.000	92,62
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	16	16	100	166.606.000	121.594.000	72,98
	1 Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	16	16	100	166.606.000	121.594.000	72,98
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	1	100	224.033.000	201.610.500	89,99
	1 Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	1	100	224.033.000	201.610.500	89,99
	4 Persentase pengelolaan sistem informasi pembangunan dan pengendalian daerah	90	90	100	612.395.280	599.821.200	97,95
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100	58,82	58,82	612.395.280	599.821.200	97,95
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1	1	100	193.515.280	191.533.700	98,98
	1 Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1	1	100	193.515.280	191.533.700	98,98
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1	1	100	399.600.000	396.645.000	99,26
	1 Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1	1	100	399.600.000	396.645.000	99,26
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	1	1	100	19.280.000	11.642.500	60,39
	1 Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	1	1	100	19.280.000	11.642.500	60,39

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Rp	Rp	Capaian
	5 Presentase Konsistensi Program RPJMD/ RPD kedalam RKPD	95	95	100	1.824.419.000	1.701.916.000	93,29
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100	63,08	63,08	1.824.419.000	1.701.916.000	93,29
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	6	6	100	722.800.000	620.811.500	85,89
	1 Penyusunan RKPD 2025	1	1	100	54.642.500	41.352.500	75,68
	2 Rancangan Awal RPJPD 2025-2045	1	1	100	118.351.200	118.351.200	100,00
	3 Penyusunan Perubahan RKPD 2024	1	1	100	68.268.500	68.268.500	100,00
	4 Rakortekrenbang Provinsi Tahun 2024	1	1	100	176.969.500	111.871.000	63,21
	5 Rakortekrenbang Nasional Tahun 2024	1	1	100	280.968.300	280.968.300	100,00
	6 Penyusunan Dokumen Perkin 2024 dan Perkin Perubahan 2024	1	1	100	23.600.000	0	0,00
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	1	100	264.095.000	261.944.500	99,19
	1 Konsultasi Publik RKPD 2026	1	1	100	264.095.000	261.944.500	99,19
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	1	100	30.500.000	28.850.000	94,59
	1 Penyepakatan Program Kegiatan dan sub kegiatan pada renja Perangkat daerah tahun 2025 dengan Mitra Bidang dan Perangkat Daerah	1	1	100	30.500.000	28.850.000	94,59
Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2	2	100	807.024.000	790.310.000	97,93
	1 Terlaksananya Konsultasi Publik RPJPD 2025-245 dan RKPD 2026	2	2	100	807.024.000	790.310.000	97,93
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI ERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					3.558.084.000	3.074.387.357	86
	1 Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsisten Dengan RPJMD/RPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	100	555.022.000	502.709.950	90,57

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Rp	Rp	Capaian
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	97,04	97,04	555.022.000	502.709.950	90,57
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	100	74.426.000	68.988.850	92,69
	1 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Renja 2025)	1	1	100	59.726.000	58.446.850	97,86
	1 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Renja Perubahan 2024)	1	1	100	14.700.000	10.542.000	71,71
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2	2	100	32.500.000	31.525.000	97,00
	1 Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Renja 2025)	1	1	100	25.300.000	24.325.000	96,15
	2 Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Renja Perubahan 2024)	1	1	100	7.200.000	7.200.000	100,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	4	100	205.488.000	179.306.000	87,26
	1 Laporan Triwulanan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	4	100	205.488.000	179.306.000	87,26
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1	1	100	94.890.000	79.521.000	83,80
	1 Laporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1	1	100	94.890.000	79.521.000	83,80
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	100	21.084.000	20.690.000	98,13
	1 Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Renja 2025)	1	1	100	15.684.000	15.290.000	97,49

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Rp	Rp	Capaian
	2 Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Renja Perubahan 2024)	1	1	100	5.400.000	5.400.000	100,00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2	2	100	21.324.000	20.990.000	98,43
	1 Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Renja 2025)	1	1	100	10.500.000	10.166.000	96,82
	2 Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Renja Perubahan 2024)	1	1	100	10.824.000	10.824.000	100,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4	4	100	72.924.000	72.299.800	99,14
	1 Laporan Triwulanan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4	4	100	72.924.000	72.299.800	99,14
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1	1	100	32.386.000	29.389.300	90,75
	1 Laporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1	1	100	32.386.000	29.389.300	90,75
	2 Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD/ RPD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100	2.180.000.000	1.828.092.151	83,86
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	79,69	79,69	2.180.000.000	1.828.092.151	83,86
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	100	126.173.000	121.137.500	96,01
	1 Rapat Koordinasi Rancangan Renja PD Mitra Sub Bidang Pemerintahan Tahun 2025	1	1	100	111.317.500	111.317.500	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Rp	Rp	Capaian
	2 Rapat Rancangan Renja Perubahan PD Mitra Sub Bidang Pemerintahan Tahun 2024	1	1	100	14.855.500	9.820.000	66,10
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2	2	100	15.140.000	11.625.000	76,78
	1 Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Renja PD Mitra Sub Bidang Pemerintahan Tahun 2025	1	1	100	10.112.000	7.625.000	75,41
	1 Penyusunan Dokumen Perubahan Rancangan Renja Akhir PD Mitra Sub Bidang Pemerintahan Tahun 2024	1	1	100	5.028.000	4.000.000	79,55
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4	4	100	48.884.000	42.889.500	87,74
	1 Penyusunan Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan PD Mitra Subid Bidang Pemerintahan	4	4	100	48.884.000	42.889.500	87,74
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	5	5	100	554.803.000	517.748.645	93,32
	1 FGD Perumusan Masalah Pembangunan Bidang Pemerintahan (SDGs)	1	1	100	247.780.000	247.780.000	100,00
	2 Rapat Fasilitasi Aksi RAN-HAM Provinsi Banten	1	1	100	46.120.000	38.500.000	83,48
	3 Forum Konsultasi Publik SDGs	1	1	100	37.972.000	33.984.500	89,50
	4 SDGs Banten Awards	1	1	100	96.521.000	81.351.145	84,28
	5 FGD Penyusunan Bahan Kebijakan Pembangunan Bidang Pemerintahan	1	1	100	126.410.000	116.133.000	91,87
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	4	100	149.272.000	128.705.000	86,22
	1 Penyusunan Dokumen Rancangan Renja PD Mitra Sub Bidang Pembangunan Manusia Tahun 2025	1	1	100	22.663.200	20.500.000	90,46
	2 Penyusunan Dokumen Rancangan Awal Renja PD Mitra Sub Bidang Pembangunan Manusia Tahun 2025	1	1	100	32.458.400	27.000.000	83,18
	3 Penyusunan Dokumen Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	1	100	71.529.600	58.584.200	81,90

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Rp	Rp	Capaian
	4 Penyusunan Dokumen Perencanaan Program Pembangunan Mitra Bidang Pembangunan Manusia (Kesejahteraan Masyarakat)	1	1	100	22.620.800	22.620.800	100,00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4	4	100	57.448.000	47.682.500	83,00
	1 Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Renja PD Mitra Sub Bidang Pembangunan manusia Tahun 2025	1	1	100	13.912.000	10.411.500	74,84
	2 Penyusunan Dokumen Perubahan Rancangan Renja Akhir PD Mitra Sub Bidang Pembangunan manusia	1	1	100	13.928.000	11.600.000	83,29
	3 Penyusunan dokumen Laporan Verifikasi Renja Tahun 2025 OPD Mitra (kesmas)	1	1	100	11.049.600	10.800.000	97,74
	4 Penyusunan Dokumen Verifikasi Renja Perubahan Tahun 2024 OPD Mitra	1	1	100	18.558.400	14.871.000	80,13
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8	8	100	195.306.800	146.258.000	74,89
	1 Penyusunan Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan PD Mitra Subid Bidang Pembangunan Manusia	4	4	100	115.716.000	95.488.000	82,52
	2 Penyusunan Dokumen Laporan FGD Perumusan Masalah Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia (kesmas)	2	2	100	69.260.800	50.230.000	72,52
	3 Penyusunan Dokumen Laporan Koordinasi, dan Konsultasi Bidang Pembangunan Manusia (kesmas)	1	1	100	0	0	0,00
	4 Penyusunan Dokumen Laporan Honorarium Sekretariat Tim Koordinasi Pelaksanaan Germas di Provinsi Banten Semester I, Semester II Tahun 2024 (kesmas)	1	1	100	10.330.000	0	0,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	7	7	100	1.032.973.200	812.046.006	78,61
	1 Penyusunan Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	1	100	177.903.000	159.520.000	89,67
	2 Penyusunan Dokumen koordinasi teknis urusan pendidikan Kabupaten/Kota	1	1	100	34.928.000	28.255.500	80,90

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Rp	Rp	Capaian
	3 Penyusunan Dokumen Evaluasi urusan pendidikan Kabupaten/Kota	1	1	100	15.128.000	15.128.000	100,00
	4 Penyusunan Dokumen Tematik Link and Match Pendidikan Vokasi	1	1	100	15.022.600	14.372.000	95,67
	5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pendidikan	1	1	100	213.817.000	219.350.000	102,59
	6 Penyusunan Dokumen laporan hasil koordinasi dan Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia (kesmas)	1	1	100	351.452.600	151.882.147	43,22
	7 Penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi, Intervensi, Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Banten 2024 (Kesejahteraan Masyarakat)	1	1	100	224.722.000	223.538.359	99,47
	3 Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsisten Dengan RPJMD/RPD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	100	100	823.062.000	743.585.256	90,34
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	83,28	83,28	823.062.000	743.585.256	90,34
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	100	19.488.000	14.925.000	76,59
	1 Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Mitra Perekonomian Tahun 2025	1	1	100	13.868.000	9.800.000	70,67
	1 Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Mitra Perekonomian Tahun 2024	1	1	100	5.620.000	5.125.000	91,19
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2	2	100	10.988.000	9.125.000	83,05
	1 Finalisasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Mitra Perekonomian Tahun 2025	1	1	100	5.368.000	4.000.000	74,52
	1 Finalisasi Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Mitra Perekonomian Tahun 2024	1	1	100	5.620.000	5.125.000	91,19

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Rp	Rp	Capaian
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4	4	100	124.410.000	114.095.500	91,71
	1 Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Mitra Perekonomian Tahun 2023	1	1	100	5.364.000	5.320.000	99,18
	2 Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Mitra perekonomian Tahun 2024 (SAKIP)	2	2	100	102.342.000	92.475.500	90,36
	3 Evaluasi Tematik Pembangunan Tahun 2024	1	1	100	16.704.000	16.300.000	97,58
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4	4	100	207.114.000	186.253.800	89,93
	1 Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pusat - Daerah Tahun Anggaran 2025	1	1	100	98.040.000	88.846.000	90,62
	2 Evaluasi Perkembangan Perekonomian Provinsi Banten	1	1	100	68.620.000	63.180.000	92,07
	3 Koordinasi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah	1	1	100	23.904.000	19.277.800	80,65
	4 Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Banten	1	1	100	16.550.000	14.950.000	90,33
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	4	100	82.260.000	76.377.400	92,85
	1 Koordinasi Penyusunan Renja 2025	3	3	100	66.360.000	62.294.500	93,87
	2 Koordinasi Penyusunan Renja Perubahan 2024	1	1	100	15.900.000	14.082.900	88,57
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2	2	100	58.434.000	57.044.400	97,62
	1 Asistensi Penyusunan Renja 2025	1	1	100	37.624.000	36.276.500	96,42
	2 Asistensi Penyusunan Renja Perubahan 2024	1	1	100	20.810.000	20.767.900	99,80
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6	6	100	195.316.000	180.529.525	92,43

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Rp	Rp	Capaian
	1 Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Pengendalian dan Monitoring Perangkat Daerah Mitra 2024	4	4	100	117.000.000	111.939.500	95,67
	2 Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Pengendalian Tematik	1	1	100	74.316.000	65.565.500	88,23
	3 Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Mitra Tahun 2023	1	1	100	4.000.000	3.024.525	75,61
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4	4	100	125.052.000	105.234.631	84,15
	1 Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional-Daerah Tahun Anggaran 2025	1	1	100	60.310.000	53.137.000	88,11
	2 Koordinasi Sinergitas Tematik Perencanaan Pembangunan Antar Perangkat Daerah Mitra Tahun Anggaran 2024	1	1	100	13.154.000	12.000.000	91,23
	3 Koordinasi Teknis (RAKORTEK)	1	1	100	27.832.000	24.071.000	86,49
	4 Evaluasi Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1	1	100	23.756.000	16.026.631	67,46
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					2.309.723.966	2.128.022.450	92,13
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					2.309.723.966	2.128.022.450	92
	1 Persentase hasil kelitbangan lingkup Ekonomi dan Pembangunan yang dihasilkan	100	100	100	666.516.400	600.852.850	90,15
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100	11,83	11,83	666.516.400	600.852.850	90,15
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1	1	100	50.000.000	37.650.850	75,30
	1 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	1	1	100	50.000.000	37.650.850	75,30
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1	1	100	50.000.000	38.279.850	76,56
	1 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup	1	1	100	50.000.000	38.279.850	76,56

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Rp	Rp	Capaian
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	5	5	100	566.516.400	524.922.150	92,66
	5 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	5	5	100	566.516.400	524.922.150	92,66
	2 Persentase hasil kelitbangan lingkup Sosial dan Kependudukan yang dihasilkan	100	100	100	114.702.000	105.330.000	91,83
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100	72,77	72,77	114.702.000	105.330.000	91,83
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1	1	100	114.702.000	105.330.000	91,83
	1 Kajian Bidang Pariwisata	1	1	100	114.702.000	105.330.000	91,83
	3 Persentase Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Inovasi, Teknologi dan Hasil Kelitbangan	100	100	100	482.555.066	440.231.600	91,23
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100	48,50	48,5	482.555.066	440.231.600	91,23
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	1	100	175.000.000	165.570.000	94,61
	1 Penyusunan Penerapan Kaji Terap teknologi	1	1	100	175.000.000	165.570.000	94,61
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2	2	100	175.000.000	161.198.600	92,11
	2 Penyusunan Indeks Inovasi daerah dan penerapan IGA	2	2	100	175.000.000	161.198.600	92,11
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1	1	100	75.000.000	65.507.000	87,34
	3 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1	1	100	75.000.000	65.507.000	87,34
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1	1	100	57.555.066	47.956.000	83,32
	4 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1	1	100	57.555.066	47.956.000	83,32

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Rp	Rp	Capaian
	4 Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	100	100	1.045.950.500	981.608.000	94
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100	94,58	94,58	1.045.950.500	981.608.000	93,85
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	3	3	100	895.950.500	851.188.300	95,00
	1 Kajian Teknokratik RPJMD 2025-2029	1	1	100	631.645.103	624.703.100	98,90
	2 Koordinasi Riset dan Inovasi Daerah	1	1	100	197.109.110	163.485.200	82,94
	3 Pengukuran IPKD	1	1	100	67.196.287	63.000.000	93,76
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1	1	100	50.000.000	36.701.500	73,40
	1 Kajian Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1	1	100	50.000.000	36.701.500	73,40
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1	1	100	50.000.000	47.093.500	94,19
	1 Kajian Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1	1	100	50.000.000	47.093.500	94,19
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	2	2	100	50.000.000	46.624.700	93,25
	1 JKPD Vol 8 Tahun 2024	2	2	100	50.000.000	46.624.700	93,25
JUMLAH					55.234.702.890	52.718.133.783	95,44

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Banten 2024 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Good Governance. Penyusunan LKjIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten pada Tahun Banten 2024 yang dituangkan menjadi 3 indikator kinerja utama Kepala Bappeda.

LKjIP juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan. Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Bappeda Provinsi Banten, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja. Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan data-data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas. Dalam pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Banten Tahun Banten 2024 secara umum tujuan, program kegiatan maupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala. Laporan Kinerja Bappeda Tahun Banten 2024 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada Renja Tahun Banten 2024 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, dikategorikan BAIK. Hasil capaian kinerja tahunan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata rata capaian PK adalah 80,02 % adalah BAIK

Hasil yang telah dicapai di tahun 2024 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalam pencapaian indikator sasaran. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja di lingkungan Bappeda Provinsi Banten yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersinergis satu sama lainnya. Keberhasilan yang telah tercapai di lingkungan Bappeda Provinsi Banten antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang membawa dampak kepada peningkatan kualitas kinerja pegawai (meningkatnya Performance Management System/PMS) di lingkungan Bappeda Provinsi Banten. Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya.

Hasil analisis terhadap keberhasilan pencapaian realisasi target pada indikator adalah, walaupun untuk pencapaian target banyak faktor yang mempengaruhi, baik dari internal maupun external, namun dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, Bappeda mampu memaksimalkan potensi sumber daya tersebut. Sehingga potensi yang dimiliki mampu mendukung ketercapaian realisasi target indikator kinerja tersebut.

Hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran terutama pada Indikator Kinerja Utama Indeks Inovasi Daerah yang belum sangat inovatif, dijadikan sebagai isu strategis yang akan diselesaikan bersama oleh semua pihak manajemen di lingkungan Bappeda Provinsi Banten, dan ini menjadi tantangan yang harus ditangani dengan baik.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan LKjIP yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Bappeda Provinsi Banten, antara lain :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dengan aplikasi (SIMAKIP) pengukuran kinerja secara komprehensif dan dapat diakses publik dalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan di Bappeda Provinsi Banten;

2. Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam dokumen LKjIP;
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Bappeda Provinsi Banten, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya
4. Dalam pengembangan Inovasi Daerah Bappeda Provinsi Banten berupaya menumbuhkan ekosistem Inovasi dengan kolaborasi Organisasi Perangkat Daerah dan pihak akademisi dan stakeholder secara berkesinambungan, sehingga Indeks Inovasi Daerah menjadi sangat Inovatif
5. Untuk Program Tata Kelola Pemerintahan Bappeda Provinsi Banten berupaya meningkatkan budaya berakhlak dalam rangka peningkatan SAKIP dan Reformasi Birokrasi

--oOo--

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. MAHDANI, SE, ST, M.Si, MM**

Jabatan : **KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

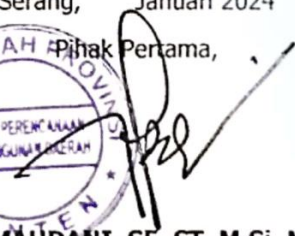
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2024

Pihak Kedua,

AL MUKTABAR

Pihak Pertama,

Dr. MAHDANI, SE, ST, M.Si, MM
NIP. 19690219 200112 1 001

**SATUAN KERJA : BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

DPA TA-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Nilai komponen Perencanaan dan Pengukuran pada Penilaian SAKIP Provinsi	Kategori/ Nilai	45
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Penerapan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Level	Sangat Inovatif
SASARAN INTERNAL				
1	Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi Berdampak di Pemerintah Provinsi Banten	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan RB berdampak sesuai dengan fokus masing-masing Perangkat Daerah	Persen	100
		Persentase Penyerapan Anggaran	Persen	95

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
5.01	PERENCANAAN	56.650.193.305
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	45.153.208.425
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	7.116.984.880
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.400.000.000
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.202.355.966
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.202.355.966
	JUMLAH BELANJA	58.852.549.271

Pj. GUBERNUR BANTEN,

**AL MUKTABAR**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,**Dr. MAHDANI, SE, ST, M.Si, MM**
NIP. 19690219 200112 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. MAHDANI, SE,ST, M.Si,MM**

Jabatan : **KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Adapun lampiran pada Perjanjian Kinerja ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Serang, 2024

Pihak Kedua,


AL MUKTABAR

Pihak Pertama,


Dr. MAHDANI, SE,ST, M.Si,MM
NIP. 19690219 200112 1 001

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODE/ RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	REALISASI (Triwulan III)	TARGET		KET
						MURNI	PERUBAHAN	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,15	70-80	70-80	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026
2	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Nilai komponen Perencanaan dan Pengukuran pada Penilaian SAKIP Provinsi	Nilai Sakip Komponen Perencanaan ditambah Komponen Pengukuran hasil dari penilaian Kemenpan RB	Kategori/ Nilai	43,15	45	47	Target berubah sesuai dengan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Penerapan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Hasil Penilaian indeks inovasi daerah Provinsi Banten yang dilakukan oleh Kemendagri	Level	Inovatif (50,41)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
5.01	PERENCANAAN	56.650.193.305	52.924.978.924	(3.725.214.381)
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	45.133.208.425	42.811.374.644	(2.321.833.781)
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	7.116.984.880	6.555.520.280	(561.464.600)
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.400.000.000	3.558.084.000	(841.916.000)
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.202.355.966	2.309.723.966	107.368.000
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.202.355.966	2.309.723.966	107.368.000
	JUMLAH	58.852.549.271	55.234.702.890	(3.617.846.381)

Pj. GUBERNUR BANTEN,**AL MUKTABAR****KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,****Dr. MAHDANI, SE, ST, M.Si, MM**
NIP. 19690219 200112 1 001



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang Banten Telepon (0254) 7039946, Faksimile (0254) 267041
Laman www.inspektorat.bantenprov.go.id, Pos-el inspektorat@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2024

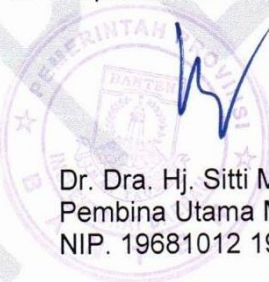
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, 28 Februari 2025

Plt. Inspektur Daerah,



Dr. Dra. Hj. Sitti Ma'ani Nina, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19681012 198803 2 003

PENGHARGAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN



1. Penghargaan Kategori Daerah Berkinerja Baik dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 dari Wakil Presiden Republik Indonesia (September 2024). Sekretariat TKPK dikoordinasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten.
2. Pemerintah Provinsi Banten meraih penghargaan terbaik kedua Pembinaan Pengelolaan Pembangunan Daerah pada SIPD Republik Indonesia terhadap Kabupaten/Kota dari Kementerian Dalam Negeri (Desember 2024). Pengelolaan SIPD Republik Indonesia oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten.

